



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Januari 2021

Halaman: 1

# Tak Ada Pilihan Lain

## ■ Perpanjangan PSTKM Hingga 8 Februari

**... tidak ada pilihan, Yogya (DIY) akan memperpanjang (PSTKM).**

**Sri Sultan HB X**  
Gubernur DIY

**Memutus Penularan**

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah pusat resmi memperpanjang kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) hingga 8 Februari mendatang. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menjelaskan, keputusan untuk memperpanjang PSTKM seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat.

"Tapi bagaimanapun kalau memang pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang, tidak ada pilihan," sambungnya.

● ke halaman 7

- Pemerintah pusat memperpanjang PSTKM hingga 8 Februari 2021. PSTKM tahap pertama sejatinya akan berakhir pada 25 Januari mendatang. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyatakan DIY pun akan memperpanjang PSTKM.
- Penularan Covid-19 di DIY terus meningkat, bahkan kemarin ada 456 kasus baru.
- Ini merupakan rekor tertinggi penularan harian di DIY sejak kasus pertama diumumkan.
- Meskipun selama PSTKM tahap pertama ini ada tren penurunan penularan di DIY sebesar 5% tapi jauh dari ekspektasi.
- Pemda DIY akan menunggu instruksi resmi dari pusat mengenai perpanjangan PSTKM ini.
- Nantinya akan disusun pemberlakuan PSTKM dengan ketentuan seperti sekarang atau dimodifikasi.
- Sisi lain, pelaku usaha berharap PSTKM tidak dilanjutkan karena berdampak pada pemasukan.
- Sejumlah PKL Malioboro mengalami penurunan omzet hingga 75% setelah pemberlakuan PSTKM nyaris dua pekan ini.

### Tak Ada

● Sambungan Hal 1

Yogya (DIY) akan memperpanjang (PSTKM)," jelas Sultan di Kompleks Kepatihan Kamis (21/1).

Menurut Sultan, selama 11 hari pemberlakuan PSTKM kasus Covid-19 belum mengalami penurunan signifikan. "Mungkin kematian sudah turun, lalu yang sembuh naik. Tapi mungkin baru dua poin, ya. Saya belum tahu sampai nanti tanggal 25 Januari," terang Raja Keraton Yogyakarta ini.

"Kecuali kalau kita punya keyakinan mungkin turun 50-100 OTG (orang tanpa gejala). Blarun yang positif lebih kecil tapi kan kemarin saja masih 281 kasus. Ya, tidak berani untuk menurunkan (PSTKM)," sambungnya.

Sultan lantas mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menanggulangi pandemi Covid-19, yakni dengan memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan masing-masing. Sehingga upaya penanggulangan Covid-19 bisa dimulai dari level paling bawah seperti desa atau kelurahan hingga RT dan RW.

"Memang bagi saya apapun kebijakan itu tetap yang namanya cuci tangan pakai masker kerumunan dan sebagainya ikut menentukan," kata Sultan. "Sehingga kami berharap bisa ikut memutus penularan khususnya di desa maupun di kampung, ya," lanjutnya.

Terlebih tren penularan ka-

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

sus Covid-19 telah berubah. Dari sebelumnya yang didominasi oleh pelaku perjalanan, kini penularan telah menjalar ke komunitas-komunitas warga. Sehingga penambahan kasus didominasi pada lingkup keluarga. "Jadi kalau itu tidak diputus sama saja. Saya kira akan makin berdampak lebih tinggi," jelasnya.

Sultan melanjutkan, bila hal itu dapat diterapkan, maka kasus Covid-19 diyakini akan mengalami penurunan. "Jadi bagi saya, pemerintah pusat wajar saja menaikkan karena masyarakat juga tidak berubah," urainya.

#### Tunggu instruksi

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Biwara Yuswantana menjelaskan, Pemda DIY belum menerima instruksi lebih lanjut terkait perpanjangan PSTKM. "Masih menunggu instruksi dari Kemendagri, seperti apa instruksinya nanti itu jadi bagian dari untuk kita mengambil kebijakan di daerah seperti apa," jelasnya saat dihubungi *Tribun Jogja*, Kamis (21/1).

Biwara menjelaskan, evaluasi sementara ini kasus Covid-19 di DIY mengalami penurunan sekitar 5 persen. Namun, penurunan itu masih di bawah ekspektasi. Sehingga DIY kembali terdampak kebijakan pembatasan dari pemerintah pusat.

"Memang kemarin itu memang ada penurunan sekitar 5 persen. Tapi kalau kita lihat kasusnya kan masih turunnya tidak signifikan. Hari ini kita belum tahu ini juga akan jadi bagian dari evaluasi kita dan

seperti apa tindak lanjut instruksi di daerah," paparnya.

Biwara belum bisa memastikan, apakah DIY akan melaksanakan PSTKM dengan aturan yang sama ataukah akan dilakukan modifikasi pada sejumlah aturan. Jika opsi modifikasi kebijakan diberlakukan, maka pengaturannya juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat. "Tapi kalau pemberlakuan se Jawa-Bali berarti sudah sitem kewilayahan, ya. Tentu ada sinergi dengan satu yang lain propinsi," paparnya.

Pengaturan secara lebih rinci di masing-masing daerah juga memungkinkan. Sebab kondisi penularan Covid-19 di tiap wilayah cenderung berbeda. "Sedangkan di tingkat daerah seperti apa kondisinya tidak sama dengan daerah lain, lah ini jadi bagian yang akan dicermati," paparnya. Sebelum 25 Januari 2021 Gugus Tugas akan kembali menggelar rapat evaluasi untuk membahas hal tersebut.

#### Masukan pakar

Agar PSTKM bisa lebih efektif, Pakar Epidemiologi UGM, dr Bayu Satria Wiratama MPH mengatakan, satuan tugas (satgas) atau relawan di tingkat RT RW harus diaktifkan. Dijelaskannya saat ini masyarakat mungkin jarang ke tempat publik. Larangan untuk makan di restoran atau kafe setelah pukul 19.00 mungkin dipatuhi.

Namun, masih ada hal yang luput dari pengamatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal itu adalah warga yang berkunjung ke rumah sanak

saudara dan berkumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan (prokes). "Jika ingin PSTKM mencapai target, menurunkan kasus positif Covid-19 di DIY, maka pemerintah harus memperketat pengawasan," ungkapnya kepada *Tribun Jogja*, Kamis (21/1).

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah hanya berfokus di ruang publik saja. Namun, pelaksanaannya masih kurang menyeluruh, sehingga tujuan yang tercapai tidak signifikan. "Maka, untuk relawan di tingkat RT RW harus jalan. Untuk menanggulangi Covid-19 ini kan pemerintah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas, sehingga masyarakat perlu ikut andil," tutur Bayu.

Dengan adanya aktivasi relawan dari pihak RT RW, kata Bayu, rapat desa, kedatangan tamu bisa diawasi. Sehingga, tidak ada lagi orang berkumpul atau bertamu untuk hal tidak penting. "Ini juga mengatasi problem dinas kesehatan yang kesulitan melacak orang kontak erat dengan pasien Covid-19," jelasnya.

Lebih lanjut, Bayu mengungkapkan, adanya PSTKM ini bukan untuk mematikan ekonomi seseorang, tapi mencegah Orang Tanpa Gejala (OTG) berjalan-jalan. OTG menjadi salah satu kategori yang cukup sulit untuk dideteksi. Sebab, penderita Covid-19 dengan gejala ringan seringkali tidak merasakan gejala apa pun. Karena hal itu, ditakutkan mereka tidak waspada dan tetap bisa menularkan ke orang lain. (tro/ard)

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 20 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005